

**PENGARUH PENGAWASAN, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada OPD Di Kota Solok)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MAHAPUTERA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2021**

**THE EFFECT OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT
SUPERVISION, ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY ON THE
PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENTS
(Empirical Study on OPD in Solok City)**

ISMI CHANDRA
171000462201033

Advisors: 1. Dr. SISKI YULIA DEFITRI, SE, M.Si
2. RITA DWI PUTRI, SE, M.Si

ABSTRACT

This study aims to determine the Effect of Regional Financial Management Supervision on Regional Government Performance, the Effect of Regional Financial Management Accountability on Regional Government Performance and Transparency of Regional Financial Management on Regional Government Performance, as well as the Effect of Regional Financial Management Supervision, Regional Financial Management Accountability and Transparency of Regional Financial Management simultaneously on Local Government Performance.

This research was conducted on OPD in Solok City, namely Twenty-eight (28) OPD. The data used are primary data, the sample technique used is a saturated sample by distributing questionnaires. The sample in this study is the entire population, namely the Head of the OPD and the Head of the Program & Finance Subdivision of each OPD in the city of Solok.

The results showed that Regional Financial Management Supervision and Regional Financial Management Transparency had a significant effect on Regional Government Performance, while Regional Financial Management Accountability had no effect on Regional Government Performance, then Regional Financial Management Supervision, Regional Financial Management Accountability and Regional Financial Management Transparency had a simultaneous effect to Local Government Performance.

Keywords: Supervision, Accountability, Transparency, Local Government Performance

**PENGARUH PENGAWASAN, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada OPD di Kota Solok)**

ISMI CHANDRA
171000462201033

Pembimbing : 1. Dr. SISKA YULIA DEFITRI, SE, M.Si
2. RITA DWI PUTRI, SE, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah serta Pengaruh Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Penelitian ini dilakukan pada OPD di Kota Solok yaitu Dua puluh delapan (28) OPD. Data yang digunakan adalah data primer, teknik sampel yang digunakan adalah sampel jenuh dengan cara menyebar kuesioner. Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi yaitu Kepala OPD dan Kasubbag Program & Keuangan dari setiap OPD di Kota solok.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Pengelolaan Keuangan daerah dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, sedangkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, kemudian Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: Pengawasan, Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Pemerintah Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah berdasarkan pasal 1 ayat 6 dinyatakan bahwa daerah otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan artinya pemerintah daerah sebagai daerah otonom memiliki hak untuk menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kinerja pemerintah dikatakan baik dapat dilihat dari pencapaian hasil yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal.

Kinerja yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian hasil tertentu, harus sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas yang harus dipertanggungjawabkan (Widajatun dan Kristiastuti, 2020). Untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program berhasil atau tidaknya diperlukan pengukuran kinerja sebagai alat ukur. Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan.

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut untuk melaksanakan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan

tanggungjawabnya. Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Harus diakui selama ini aparatur pemerintah dalam tugasnya belum secara optimal memperlihatkan citra dan kinerja yang diharapkan berdasarkan prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Masalah yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu dilihat dari pelayanan yang lamban maupun penyelesaian pembangunan yang tidak tepat waktu. Sehingga penilaian dari masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintahan dinilai sangat rendah. Ini dikarenakan kinerja aparatur pemerintah melenceng dari peraturan-peraturan setiap dinas sehingga masyarakat menuntut agar kinerja pemerintahan yang lebih baik. Tuntutan akan kinerja pemerintah yang baik ini terjadi hampir disemua pemerintahan seiring dengan diterapkannya otonomi daerah dan penetapan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan pemerintah termasuk di pemerintahan daerah Kota Solok.

Kinerja instansi pemerintah berkaitan erat dengan pengawasan, akuntabilitas dan transparansi. Memantapkan mekanisme akuntabilitas diperlukan manajemen kinerja yang baik. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang baik. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Jitmau et al., 2017). Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pekerjaan, sebab dengan adanya pengawasan yang baik maka sesuatu pekerjaan akan dapat berjalan lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal. Semakin lancar kerja dan disertai pengawasan yang baik maka pekerjaan itu akan berhasil dengan baik. Adanya pengawasan yang baik akan mendorong pegawai lebih giat dalam bekerja dan menghasilkan kerja yang baik pula terlebih apabila menyelesaikan pekerjaannya dengan semangat yang baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat dikenali, agar dapat pula segera diambil tindakan koreksi, melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuan secara maksimal. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian sebelumnya Fifit Purnama (2016) mengemukakan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, artinya semakin baik tingkat pengawasan keuangan daerah maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Penelitian (Wiguna et al., 2015) menunjukkan Pengawasan Keuangan daerah juga berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian (Benawan et al., 2018) menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja, ini artinya masih rendahnya pengawasan keuangan pada instansi pemerintah sehingga mengakibatkan buruknya kinerja pemerintah daerah.

Selain pengawasan pengelolaan keuangan, hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan menjalankan azas akuntabilitas pengelolaan keuangan, pemerintah diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian kualitas kinerja pemerintah dapat dikatakan baik karena telah memenuhi tanggungjawabnya kepada masyarakat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah artinya semakin tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah (Asrini, 2017). Berbeda dengan penelitian (Jitmau et al., 2017) menunjukkan Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah hal ini dikarenakan bahwa

pemerintah gagal dalam menjalankan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah tidak dilakukan dengan benar oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Selain pengawasan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting diterapkan pada penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur dan benar. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya untuk dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik sehingga akan berdampak bagi masyarakat. Dengan dilakukannya transparansi tersebut, publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga pemerintah dapat dikatakan baik apabila masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah. Penelitian (Turalaki et al., 2017) menunjukkan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, artinya semakin transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian (Nopriansyah et al., 2016) menunjukkan bahwa Transparansi tidak berpengaruh terhadap Kinerja.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris OPD di Kota Solok).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Apakah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
3. Apakah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
4. Apakah Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
3. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
4. Pengaruh Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam mendukung aparatur pemerintahan terutama aparatur daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, khususnya Pengawasan, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pembanding atau referensi untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan ini terdiri dari Bab 1 sampai dengan Bab 3, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis dan sumber data, populasi, sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran serta teknik analisis data.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan pengujian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

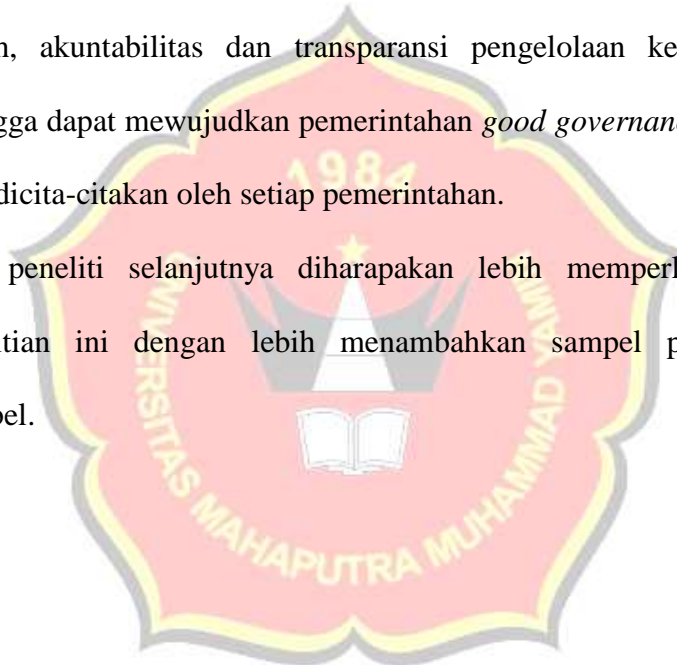
1. Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan Semakin baik tingkat pengawasan dalam pengelolaan Keuangan Daerah akan semakin baik pula kinerja pemerintah daerah.
2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dikarenakan bahwa pemerintah gagal dalam menjalankan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah tidak dilakukan dengan benar oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan semakin transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah. Dimana dengan adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terjadi peningkatan terhadap kinerja karena semua kegiatan, program, pengelolaan keuangan dilakukan dengan terbuka dan dipublikasikan.

4. Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian diatas saran yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kota Solok agar dapat memperhatikan hal-hal yang mendukung meningkatnya kinerja pemerintah daerah menjadi lebih baik seperti pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat mewujudkan pemerintahan *good governance* sebagaimana yang dicita-citakan oleh setiap pemerintahan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih memperluas jangkauan penelitian ini dengan lebih menambahkan sampel penelitian serta variabel.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, M. I. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Asrini, A. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Skpd Di Pemerintah Daerah Kota Palu. *Katalogis*, 5(1), 52–58.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Erlangga, Jakarta.
- Benawan, E. T. P., Saerang, D. P. E., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 72–79. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.19995.2018>
- Cholid Nabuko, H. A. A. (2010). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara.
- Djalil, R. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta.
- Fahmi Reeve, N. (2014). *Prinsip-Prinsip Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Fifit Purnama, N. (2016). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 1–15. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/743>
- Ghozali, L. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, S. S. (2012). *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Heru Rochmansjah, C. S. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik*. Bandung: Fokusmedia.
- Ihyaul, U. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Jitmau, F., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 276–285. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.16036>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mangkunegara, A. P. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moeheriono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mohammad, M. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE-Yogyakarta.
- Murhaini, M. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Nanang Martono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder Edisi Ke 2*. Jakarta.
- Nopriansyah, P., Erlina, & Sari, T. A. (2016). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Pengawasan sebagai Variabel Moderating Pada Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi*, 19(4), 166–174.
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 51–62. <https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983>
- Nurlaila. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ternate: LepKhair.
- Nuryaman, & Christina, V. (2015). *Metodologi Penelitian Akuntansi dan bisnis* (1st ed.). Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, (2011).
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Priyatno, D. (2010). *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data*

Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendadaran. BPFE UGM.

Rai, I. gusti A. (2011). *Audit Kinerja pada Sektor Publik.* Jakarta: Grafindo.

Siagian, P. S. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, R&D.* CV. Alfabeta.

Suharyono, S. (2019). The Effect Of Accountability, Transparency, And Supervision On Budget Performance By Using The Concept Of Value For Money In Regional Business Enterprises (Bumd) Of Riau Province. *International Journal of Public Finance*, 4(2), 236–249. <https://doi.org/10.30927/ijpf.584834>

Sukarna, D. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen.* Bandung: Mandar Manju.

Sumarsono, S. (2010). *Manajemen Keuangan Pemerintahan.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tjandra, R. (2013). *Hukum Keuangan Negara.* PT. Grasindo, Jakarta.

Turalaki, S., Tinangon, J., & Wokas, H. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Publik Terhadap Kinerja Pelayanan Di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 1182–1192. <https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.16145>

Umar, Z. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh.* 6(2), 136–148. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9yzk7>

Widajatun, V. W., & Kristiastuti, F. (2020). The Effect of Regional Financial Supervision, Accountability and Transparency of Regional Financial Management on Local Government Performance. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(4), 2966–2974. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i4.1319>

Wiguna, M. B. S., Yuniartha, G. A., & Darmawan, N. A. S. (2015). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 3*(No. 1), 1–12.

Wiyono, G. (2011). *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & Smart PLS 2.0.* Percetakan STIM YKPM.